

## IMPLIKASI *LEGITIMACY THEORY* DALAM CSR BANK KALBAR UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SDM DI KALIMANTAN BARAT

Nina Febriana Dosinta<sup>1</sup>, Handi Brata<sup>1</sup>, Elok Heniwati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tanjungpura, Pontianak

Email korespondensi : nina.febriana.d@ekonomi.untan.ac.id

### Abstrak

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan wujud komunikasi dan akuntabilitas Bank KALBAR kepada *stakeholders*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implikasi *legitimacy theory* dalam program CSR Bank KALBAR, khususnya di bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan *content analysis*. Hasil menunjukkan bahwa CSR diterapkan sebelum adanya *mandatory* UU. No 40 tahun 2007 yang mewajibkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun pengungkapan CSR masih bersifat *voluntary*, Bank KALBAR telah mengungkapkan CSR pada laporan tahunan 2006. Pelaksanaan CSR Bank KALBAR diwujudkan dalam 6 bidang, salah satunya dengan pendidikan sebagai prioritas pertama. Dalam satu dasawarsa terakhir, sebagai wujud peran nyata Bank KALBAR, CSR di bidang pendidikan memberikan nilai tambah dan berupaya memenuhi harapan masyarakat. Dengan menerapkan program CSR di bidang pendidikan, kepedulian utama Bank KALBAR adalah meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Program CSR Bank Kalbar telah memenuhi unsur-unsur dari *legitimacy theory*. Pengungkapan CSR Bank KALBAR sesuai *legitimacy theory*.

Kata Kunci : Legitimacy Theory, Corporate Social Responsibility, Stakeholders, Mandatory, Voluntary, SDM, Akuntabilitas.

### PENDAHULUAN

Praktik pengungkapan sosial dan lingkungan dapat menginformasikan dampak sosial dan lingkungan perseroan kepada *stakeholders* (Unerman, 2000). Praktik ini merupakan wujud pelaksanaan akuntabilitas dan kesadaran perseroan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan; (Adams, 2004; Burritt, 2012; Unerman, 2000).

*Voluntary* dalam pelaporan tanggung jawab sosial perseroan merupakan *legitimacy* perseroan yang menerapkan fungsi akuntabilitas perseroan (Conway, O'Keefe & Hraskey 2015, Brennan & Solomon 2008). Kecenderungan memunculkan *legitimacy* perseroan dalam CSR, menunjukkan akuntabilitas dan kontrak sosial (Gray, Owen & Maunders 1988).

*Voluntary Social and Environmental Disclosure* (SED) dalam laporan tahunan 1955 sampai dengan 1999 pada perseroan rokok Rothmans Ltd menunjukkan motivasi *legitimate* perseroan dari ancaman bahayanya rokok bagi kesehatan (Tilling & Tilt 2010).

Penelitian akuntansi sosial yang memiliki kontribusi dalam pemahaman aktivitas SED didominasi *legitimacy theory* diantaranya,

(Deegan, 2002; Deegan & Rankin, 1996; Deegan, Rankin & Tobin, 2002; Milne & Patten, 2002; dan O'Donovan, 2002).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terdapat dalam laporan tahunan merupakan wujud komunikasi dan akuntabilitas perseroan kepada *stakeholders*, di antaranya Bank KALBAR sebagai perseroan perbankan di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam penyusunan laporan keuangan, perseroan perbankan menggunakan beberapa acuan, diantaranya Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 14 dalam IAI (2014), SAK tidak mengatur ruang lingkup perseroan dalam mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. Sedangkan di dalam IAI (2008), PAPI tidak menyinggung pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas Bab V pasal 74 berisikan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya, kewajiban perseroan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Terakhir, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

*Mandatory* dalam tanggung jawab sosial mengharuskan perseroan untuk menganggarkan dan memperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaporannya diungkapkan dalam CSR. Berkaitan dengan pengungkapan CSR, penelitian ini bertujuan pada penjelasan tentang implikasi dari *legitimacy theory* yang terdapat dalam CSR Bank KALBAR, khususnya bidang pendidikan sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kualitas SDM di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Penjelasan implikasi tersebut ditujukan untuk pembuat kebijakan pada Bank KALBAR dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia sebagai solusi mengatur pengalokasian CSR dalam meningkatkan kualitas SDM.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teori dalam pelaksanaan CSR pada perseroan. Berikutnya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan wacana kepada *stakeholder* dalam upaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan CSR dalam bidang pendidikan. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian terkait dengan penerapan CSR untuk peningkatan kualitas SDM.

Penelitian dilanjutkan dengan kerangka teori mengenai penjelasan CSR, *legitimacy theory* pada CSR, dan CSR dengan SDM; selanjutnya metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif dengan penerapan *content analysis*; berikutnya hasil dan pembahasan, dimulai dari realisasi pelaksanaan program CSR Bank

KALBAR di bidang pendidikan, kemudian pemahaman lebih mendalam *legitimacy theory* dan CSR Bank KALBAR; terakhir kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian.

## KERANGKA TEORI CSR

Evolusi pelaporan CSR pada awal tahun 1970 dengan tujuan pemasaran perseroan, Prancis merupakan negara pertama yang memasukkan CSR untuk dilaporkan dalam perseroan publik pada tahun 2003 (Tscopp & Huefner 2012). Tujuan lain, pelaksanaan CSR dipertimbangkan sebagai *philanthropy* perseroan (ACCA, 2002).

Commission of European Communities (2001) dalam (Deegan, 2007) mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep untuk perseroan agar bertanggung jawab terhadap masyarakat, perseroan tidak hanya memenuhi ekspektasi hukum, tetapi menggabungkan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis serta interaksi dengan *stakeholder* nya dengan dasar *voluntary*.

Perkembangan CSR menimbulkan wacana baru, diuraikan Mathew (1984) dalam (Belkaoui, 2004), yaitu (1) *Social Responsibility Accounting* (SRA) bertujuan untuk mengungkapkan *item-item* individual yang memiliki dampak sosial, (2) *Total Impact Accounting* (TIA) bertujuan pengukuran biaya total yang berasal dari publik dan swasta sebagai akibat menjalankan operasi usaha, (3) *Socio Economic Accounting* (SEA) bertujuan mengevaluasi proyek-proyek yang didanai berasal dari keuangan dan nonkeuangan, (4) *Sosial Indicators Accounting* (SIA) bertujuan mengkualifikasi nonkeuangan jangka panjang yang berasal dari hasil statistik sosial.

Praktik pengungkapan CSR telah banyak diterapkan oleh perseroan publik di Indonesia pada laporan tahunannya, perseroan berhak memilih bentuk pengungkapan yang sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas organisasinya (Yuliana, Purnomosidhi, & Sukoharsono 2008).

Hendriksen & Van Breda (2001) menyatakan 3 (tiga) konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan; yaitu *adequate*, *fair* dan *full*. Hendriksen & Van Breda (2001) menjelaskan bahwa; (1) pengungkapan memadai (*adequate*) menyiratkan pengungkapan minimum yang cukup untuk membuat laporan tersebut tidak

menyesatkan, (2) pengungkapan wajar (*fair*) menyiratkan pengungkapan yang memberikan perlakuan yang sama untuk calon pembaca, dan (3) pengungkapan lengkap (*full*) menyiratkan penyajian semua informasi yang relevan.

Pihak manajemen dapat menginformasikan yang terjadi dalam perseroannya dengan memilih kebijakan akuntansi yang sesuai digunakan perseroan melalui pengungkapan *voluntary* (Scott, 2003). Pengungkapan *voluntary* adalah pengungkapan yang dilakukan perseroan di luar dari yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas (Suwardjono, 2010). *Voluntary* dalam pengimplementasian CSR merujuk pada belum adanya regulasi di bidang CSR (Kotler & Lee 2005).

Pelaksanaan CSR di Indonesia sebelum pengesahan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 16 Agustus 2007 bersifat *voluntary*, bentuk pengungkapan disesuaikan dengan kompleksitas perseroan. Dalam bagian penjelasan regulasi tersebut, tujuan mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. CSR merupakan aktivitas perseroan yang bersifat *mandatory* oleh hukum dengan adanya regulasi tersebut.

Urgensi penerapan CSR dari *voluntary* ke *mandatory* terdapat dalam bagian penjelasan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

### **Legitimacy Theory pada CSR**

*Legitimacy theory* merupakan suatu gagasan tentang pentingnya kontrak sosial antara perseroan dengan masyarakat (Deegan, 2007). Lindblom (1994) dalam (Deegan, 2007) menjelaskan bahwa dalam kontrak sosial, perseroan harus bisa menghargai harapan masyarakat, perseroan *legitimate* artinya perseroan berupaya memenuhi harapan masyarakat dan selanjutnya telah menerapkan norma-norma yang diharapkan masyarakat di sekitarnya.

Kontrak sosial antara perseroan dan masyarakat merupakan sesuatu yang penting, mewakili harapan masyarakat secara implisit dan eksplisit, ditujukan agar perseroan melakukan suatu kegiatan sesuai harapan masyarakat (Deegan 2007; Rankin, Stanton, McGowan, Ferlauto, & Tilling 2012; Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton & Holmes 2010).

*Legitimacy* merupakan alasan penting bagi eksistensi perseroan, berbagai macam cara dilakukan oleh perseroan untuk memperoleh *legitimacy* (Chariri & Nugroho 2009). Agusti & Rahman (2011) mengemukakan bahwa menurut *legitimacy theory*, pengungkapan CSR menggambarkan bahwa operasional perseroan berlangsung sesuai dengan sistem dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat.

Sesuai *legitimacy theory*, suatu perseroan harus bisa menunjukkan keberadaan institusi tersebut di mata masyarakat, sehingga aktivitas perseroan dapat diterima dan selaras dengan tuntutan masyarakat (Agusti & Rahman, 2011).

Branco & Rodrigues (2006) menguji pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perseroan yang terdapat dalam laporan tahunan yang dipublikasikan pada *web site* perseroan. Hasil penelitian Branco & Rodrigues (2006) di antaranya adalah perseroan menggunakan laporan tahunan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan *stakeholder*, dan dengan adanya *legitimacy theory*, terdapat pengungkapan tanggung jawab sosial perseroan perbankan di Portugis.

*Legitimacy* juga menjadi alasan perseroan dalam mempublikasikan laporan tahunan (Chariri, 2010). Deegan (2007) menyatakan, *legitimacy theory* mengusulkan adanya suatu hubungan antara pengungkapan perseroan dengan harapan masyarakat. Hubungan tersebut melalui laporan tahunan yang dipublikasikan dalam *web site* perseroan sebagai alat komunikasi untuk pelaporan pengungkapan CSR.

Dengan adanya *legitimacy theory* dalam perseroan, peran nyata perseroan dalam memenuhi harapan masyarakat yang implisit dan eksplisit dari hasil kontrak sosial, menunjukkan keberadaan institusi tersebut di mata masyarakat. Peran nyata perseroan dengan penerapan CSR, pelaporannya dengan mengungkapkan aktivitas CSR dalam laporan tahunan perseroan.

Kontrak sosial antara perseroan dan masyarakat, keberadaan institusi di mata masyarakat, dan peran nyata perseroan dalam memenuhi harapan masyarakat merupakan unsur-unsur dari *legitimacy theory*.

Lindawati & Puspita (2015) memaparkan manfaat bagi perseroan dalam jangka panjang dengan adanya pengungkapan CSR, diantaranya (1) menjaga *legitimacy* yang diperoleh perseroan, (2) tercermin pada harga saham, peningkatan nilai perseroan dan (3) menjaga eksistensi dari perseroan, peningkatan penjualan.

### CSR dengan SDM

Manfaat CSR bagi masyarakat dikemukakan Ambadar (2008) yaitu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, tabungan, konsumsi dan investasi dari rumah tangga warga masyarakat. Berbagai implementasi CSR melalui kegiatan pemberian beasiswa dan pembangunan infrastruktur lembaga pendidikan oleh berbagai perseroan menjadikan peran pendidikan akan semakin besar dalam pengembangan masyarakat (Naraduhita & Sawarjuwono 2012).

CSR dapat diaplikasikan dalam 2 (dua) perspektif menurut Sheehan, Garavan & Carbery (2014), (1) perspektif makro, berhubungan dengan strategi perseroan (Shen & Zhu 2011), dan (2) perspektif mikro, berperan dalam membantu peran *Human Resources Development* (HRD). Manusia sebagai sumber daya yang berharga bagi organisasi dan merupakan bagian yang integral dari satu kumpulan sumber daya (Belkaoui, 2004).

Manusia yang berbeda dalam mengelola suatu aset atau sekumpulan aset yang sama, bisa menghasilkan nilai tambah yang berbeda (Harahap, 2007). Branco & Rodrigues (2009) mengeksplorasi pentingnya *Social Responsibility Disclosure* (SRD) pada perseroan di Portugis menggunakan laporan tahunan yang dipublikasikan melalui *website* perseroan, hasil menunjukkan bahwa perseroan sebaiknya lebih mengungkapkan informasi *item-item* tanggung jawab sosial di dalam dan di luar lingkungan perseroan yang berkaitan dengan SDM.

CSR yang diaplikasikan dalam perspektif mikro dapat meningkatkan kualitas SDM, karena manusia sebagai sumber daya berharga bagi suatu organisasi. Dengan adanya peningkatan kualitas

SDM, dapat memberikan nilai tambah yang berbeda, diantaranya menyelesaikan *study* dalam jenjang pendidikan SD, SMP, SMU, S1, S2, S3, dan mempersiapkan SDM dalam memasuki dunia kerja.

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan *content analysis* yang dikembangkan untuk menilai peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Barat dalam CSR BANK KALBAR pada kerangka *legitimacy theory*. Vourvachis & Woodward (2015) menyarankan menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan *content analysis* dalam penelitian *Social and Environmental Reporting* (SER). *Content analysis* dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang menggunakan sekumpulan prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks (Smith, 2015; Weber 1990), dapat dilakukan dengan metode kodifikasi teks ke kelompok yang berbeda berdasarkan kriteria yang dipilih (Weber, 1990; Sekaran & Bougie 2009). Metode ini telah sering digunakan untuk memahami *Social and Environmental Accounting* (SEA) (Guthrie & Abeysekera 2006).

Tahap yang penting dilakukan dalam *content analysis* adalah diarahkan untuk memutuskan dokumen yang akan dianalisa (Krippendorff, 2004). *Content analysis* mengkaji dokumen-dokumen berupa kategori umum dari makna penelitian (Somantri, 2005). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), pelaporan tanggung jawab sosial perseroan (*Corporate Social Responsibility*) yang dipublikasikan dalam Laporan Tahunan Bank KALBAR dari tahun 2006 sampai dengan 2016 melalui *website* perseroan dan data-data pendukung yang dipublikasikan dalam media massa *online* serta *website* universitas berkaitan dengan penerapan CSR Bank KALBAR. CaLK memberikan informasi yang bersifat kebijakan maupun informasi yang bersifat rinci dari *item-item* dalam laporan keuangan (Isgiyarta, 2009).

Tahap berikutnya, kodifikasi sesuai dengan realisasi bantuan program CSR yang diberikan untuk bidang pendidikan dari tahun 2006 sampai dengan 2016, dimana analisis disesuaikan dengan

sasaran tingkat pendidikan. Kodifikasi yang digunakan dalam 9 (sembilan) kelompok; (1) bantuan biaya pembinaan untuk anak-anak (2) bantuan untuk yang akan masuk sekolah (3) bantuan kegiatan kesiswaan/kemahasiswaan (4) bantuan penulisan skripsi dan thesis (5) bantuan biaya pendidikan untuk dosen (6) bantuan untuk lembaga-lembaga pendidikan (7) bantuan fisik (8) bantuan lainnya (9) beasiswa.

Tahap terakhir adalah interpretasi dari kodifikasi yaitu menghubungkan dengan cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan tingkat perekonomian penerima beasiswa.

Berikutnya, pembahasan dampak penerapan CSR Bank KALBAR dengan adanya *legitimacy theory*, yaitu (1) bagi Bank KALBAR, (2) bagi komunitas di bawah naungan Bank KALBAR dan, (3) bagi masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Program CSR Bank KALBAR Dalam Bidang Pendidikan

Definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan di paparkan sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 dalam CSR Bank KALBAR. Definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU No. 40 tahun 2007 adalah, “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

PT Bank Kalbar (Persero) Tbk telah melaksanakan tanggung jawab sosial dalam 6 (enam) bidang; (1) bidang pendidikan (2) bidang kesehatan (3) bidang sosial dan budaya (4) bidang lingkungan hidup (5) bidang perekonomian (6) bidang donasi dan bencana alam. Pelaksanaan CSR Bank KALBAR s/d tahun 2016 yang diwujudkan dalam 6 bidang, dengan pendidikan sebagai prioritas pertama.

Dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perseroan juga menginformasikan sumber dana untuk kegiatan CSR Bank KALBAR bersumber dari dana kesejahteraan yang diperoleh dari penyisihan laba setelah pajak yang besarnya ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

CaLK dalam Laporan Tahunan Bank KALBAR tahun 2006 sampai dengan 2016 menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Bank KALBAR disusun sesuai SAK dan praktik-praktik perbankan sesuai dengan PAPI serta pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan.

CaLK dalam Laporan Tahunan Bank KALBAR mengungkapkan bahwa pengalokasian sumber dana untuk kegiatan CSR dimasukkan dalam rekening sumbangan pada bagian beban non operasional tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, rekening CSR pada bagian beban non operasional tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Berdasarkan data dari Tabel 1 dapat diuraikan bantuan biaya pembinaan anak-anak yang berprestasi melalui Khatulistiwa Fun Art (Khacifa) diungkapkan dalam CSR Tahun 2010, menunjukkan sasaran pada tingkat pendidikan sekolah/madrasah/pesantren.

Bantuan untuk anak pegawai dan pensiunan Bank KALBAR yang akan masuk sekolah dan berprestasi diungkapkan dalam CSR Tahun 2010 dan 2012, menunjukkan sasaran pada tingkat pendidikan sekolah/madrasah/ pesantren.

Bantuan kegiatan kesiswaan / kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh organisasi siswa/mahasiswa diungkapkan dalam CSR Tahun 2013 s/d Tahun 2015, menunjukkan sasaran pada tingkat pendidikan sekolah/ madrasah/pesantren dan S1. Bank KALBAR berperan sebagai sponsor untuk kegiatan olahraga, diungkapkan dalam CSR tahun 2007 dan 2009.

Tabel 1 : Bantuan Program CSR Dalam Bidang Pendidikan

No	Bantuan Program CSR Dalam Bidang Pendidikan	Sekolah/ Madrasah/ Pesantren	Pendidikan Tinggi		
			S1	S2	S3
1.	Bantuan biaya pembinaan untuk anak-anak.	●			
2.	Bantuan untuk yang akan masuk sekolah.	●			

3.	Bantuan kegiatan kesiswaan/ kemahasiswaan	●	●		
4.	Bantuan penulisan skripsi dan thesis.		●	●	
5.	Bantuan biaya pendidikan untuk dosen			●	●
6.	Bantuan untuk lembaga-lembaga pendidikan	●	●		
7.	Bantuan fisik.	●	●		
8.	Bantuan lainnya	●	●	●	●
9.	Beasiswa	●	●		

Bantuan penulisan skripsi dan thesis diungkapkan dalam CSR Tahun 2010 dan s/d Tahun 2012. Untuk bantuan penulisan skripsi dilanjutkan sampai dengan tahun 2015, menunjukkan sasaran pada tingkat Pendidikan Tinggi S1 dan S2.

Bantuan biaya pendidikan kepada dosen dari universitas/ perguruan tinggi di Kalimantan Barat yang melanjutkan program S2 atau S3 diungkapkan dalam CSR tahun 2010, 2011 dan 2013, menunjukkan sasaran pada tingkat Pendidikan Tinggi S1 dan S2.

Bantuan kepada lembaga pendidikan formal dan informal diungkapkan dalam CSR tahun 2013 s/d tahun 2015.

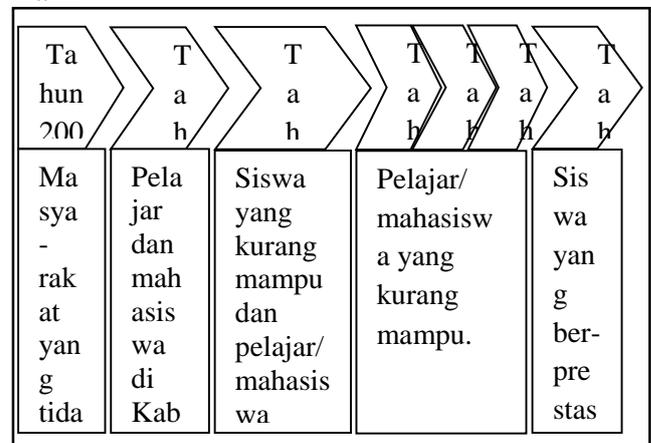
Bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan, antara lain STKIP PGRI Pontianak, Fakultas Kedokteran UNTAN dan SMA Negeri 4 Pontianak diungkapkan dalam CSR tahun 2010, menunjukkan sasaran pada tingkat pendidikan sekolah/madrasah/ pesantren dan Pendidikan Tinggi S1.

Bantuan fisik berupa pembangunan perpustakaan sekolah di Kota Pontianak, diungkapkan tahun 2010. Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan operasional untuk kegiatan pendidikan kepada Universitas Tanjungpura diungkapkan dalam CSR tahun 2012.

Bantuan fisik berupa sarana dan prasarana pendidikan antara lain ruang kelas, kursi dan meja belajar, papan tulis, komputer, alat peraga, toilet, dan lain-lain diungkapkan dalam CSR tahun 2014 sampai dengan 2016. Bantuan fisik menunjukkan sasaran pada tingkat pendidikan sekolah/madrasah/pesantren dan Pendidikan Tinggi S1.

Bantuan lainnya ditujukan kepada yayasan/ sekolah/ madrasah/ pesantren dan perguruan tinggi, menunjukkan sasaran pada tingkat pendidikan sekolah/madrasah/ pesantren dan Pendidikan Tinggi S1, S2 dan S3.

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 1 menunjukkan selama 7 tahun yaitu tahun 2006, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, Bank



Gambar 1 : Bantuan Beasiswa Pada Program CSR Dalam Bidang Pendidikan Tahun 2006 s/d 2016

KALBAR peduli dengan pelajar/mahasiswa yang kurang mampu, pelajar/mahasiswa yang berprestasi dan masyarakat yang tidak mampu, menunjukkan upaya Bank KALBAR dalam meningkatkan kualitas SDM yang memiliki keterbatasan dalam perekonomian serta SDM yang memiliki prestasi untuk melanjutkan pendidikan.

Bantuan beasiswa pada program CSR tahun 2006 kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan satu-satunya bantuan yang diberikan Bank KALBAR sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat Kalimantan Barat dalam bidang pendidikan. *Voluntary* dalam pelaporan tanggung jawab sosial perseroan tahun 2006 diungkapkan dengan kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Kepedulian Bank KALBAR terhadap pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Landak yang merupakan bagian dari Wilayah Provinsi

Kalimantan Barat pada tahun 2010 menunjukkan kesadaran Bank KALBAR untuk peningkatan kualitas SDM di kabupaten.

Kepedulian Bank KALBAR terhadap siswa kurang mampu pada tahun 2012 menunjukkan upaya dalam meningkatkan kualitas SDM khususnya pelajar pada sekolah/madrasah/pesantren untuk tetap melanjutkan pendidikan. Pada tahun 2012, Bank KALBAR juga memberikan bantuan terhadap pelajar/siswa yang berprestasi.

Bantuan beasiswa pada program CSR dalam bidang pendidikan tahun 2012 s/d 2016 ditujukan untuk pelajar/mahasiswa yang kurang mampu, menunjukkan kepedulian Bank KALBAR pada pelajar di sekolah/ madrasah/pesantren dan pada mahasiswa di perguruan tinggi secara berkelanjutan. Diantaranya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) 2016 yang tidak mampu dalam perekonomian dapat melanjutkan *study* dengan beasiswa dari Bank KALBAR.

### **Legitimacy Theory dan Pengungkapan CSR Bank Kalbar**

Dalam *legitimacy theory* menyatakan bahwa organisasi berupaya secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kegiatan yang mereka lakukan *legitimate* oleh pihak luar, perseroan memiliki cara beroperasi sesuai dengan batasan-batasan dan norma-norma yang berlaku (Deegan 2007; Guthrie & Cuganesan 2006).

Archel, Husillos, Larrinaga & Spence (2009) mengembangkan ruang lingkup *legitimacy theory* dengan penerapan strategi *legitimacy* pada perseroan dan karakteristik ekonomi politik negara, hasil penelitian menunjukkan perseroan yang menggunakan SED untuk *legitimacy* produk baru didukung oleh Negara Spanyol.

Pada pengungkapan CSR Bank KALBAR terdapat pernyataan, "...CSR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*)" (Bank Kalbar 2017). Dengan adanya pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa *legitimacy* yang terdapat dalam CSR Bank KALBAR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), didukung dari Pemerintah Indonesia.

Pengungkapan CSR Bank KALBAR diterapkan sebelum adanya *mandatory* UU. No 40 tahun 2007 yang mewajibkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun pengungkapan CSR masih bersifat *voluntary*, Bank KALBAR telah mengungkapkan CSR pada laporan tahunan 2006.

*Mandatory* pengungkapan CSR dalam UU. No 40 tahun 2007 yang mewajibkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diterapkan Bank KALBAR sampai dengan tahun 2016.

Pengungkapan CSR Bank KALBAR dari tahun 2006 sampai dengan 2011 merupakan pengungkapan memadai, menyiratkan pengungkapan minimum yang cukup untuk membuat laporan tersebut tidak menyesatkan. Pengungkapan CSR Bank KALBAR dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 merupakan pengungkapan wajar menyiratkan pengungkapan yang memberikan perlakuan yang sama untuk calon pembaca, diantaranya pengungkapan sumber dana CSR. Pengungkapan CSR Bank KALBAR tahun 2016 merupakan pengungkapan lengkap menyiratkan penyajian semua informasi yang relevan, diantaranya dilengkapi pengungkapan metode program CSR dengan metode partisipatif, yaitu dengan memberdayakan potensi daerah yang ada agar dapat meningkatkan kemampuan, penghasilan dan kemakmuran secara berkelanjutan.

Manajemen perseroan dapat menentukan harapan masyarakat dengan mengandalkan media, melalui media diharapkan akan membentuk harapan masyarakat (O'donovan 1999). Pengungkapan CSR dalam laporan tahunan Bank Kalbar melalui *website* perseroan merupakan salah satu media yang diharapkan akan membentuk harapan masyarakat. Beasiswa yang ditujukan bagi siswa/mahasiswa kurang mampu yang diumumkan di papan pengumuman sekolah atau dalam *website* sekolah/universitas diharapkan akan membentuk harapan siswa/mahasiswa untuk melanjutkan *study*.

Implikasi *legitimacy theory* dalam CSR Bank KALBAR untuk meningkatkan kualitas pendidikan SDM di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat ditunjukkan dalam pelaporan CSR khususnya bidang pendidikan.

Bebington, Gonzalez & Abadia (2008) mengemukakan bahwa *legitimacy* menyatakan secara tidak langsung bahwa kontrak sosial antara perseroan dan masyarakat dapat mengganggu kelangsungan perseroan, dan jika terjadi akan memberhentikan keberlanjutan perseroan.

Konsep *legitimacy* yang dikemukakan Bebington et al (2008) tidak terjadi pada Bank KALBAR. Terdapat pernyataan dalam pengungkapan CSR Bank KALBAR, "...sebagai wujud apresiasi atas dukungan masyarakat serta sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat di lingkungannya, berbagai kegiatan sosial telah menjadi bagian penting dari perseroan dan dilaksanakan secara berkesinambungan"(Bank Kalbar 2017).

Komitmen Bank KALBAR dalam memberikan bantuan beasiswa tahun 2006 s/d tahun 2016 secara berkelanjutan memenuhi kontrak sosial Bank KALBAR terhadap masyarakat. Pemenuhan kontrak sosial Bank KALBAR sesuai *legitimacy theory*.

Penerapan CSR Bank KALBAR dengan adanya *legitimacy theory* memberikan dampak bagi Bank KALBAR, bagi komunitas di bawah naungan Bank KALBAR dan bagi masyarakat. Bagi institusi Bank KALBAR, penerapan CSR BANK KALBAR berdampak pada tingkat kepercayaan terhadap institusi perbankan daerah. Diantaranya peresmian Kantor Cabang Bank KALBAR 2017 (Ngadri, 2017).

Bagi komunitas di bawah naungan Bank KALBAR, diantaranya bantuan untuk anak pegawai dan pensiunan Bank KALBAR yang akan masuk sekolah untuk melanjutkan *study* tahun 2010 dan 2012. Bagi masyarakat sekitar, diantaranya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) 2016 menerima program bantuan beasiswa Bank KALBAR, sebelumnya menunggak pembayaran SPU dan SPP.

Dengan penerapan CSR, peran nyata Bank KALBAR telah memberikan dampak bagi Bank KALBAR, bagi komunitas di bawah naungan Bank KALBAR dan bagi masyarakat sekitarnya. Peran nyata Bank KALBAR juga membantu dalam melaksanakan salah satu misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (2015) yaitu meningkatkan kualitas SDM yang handal dan memiliki daya saing. Data Badan Pusat Statistik

(2015) menunjukkan bahwa proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 32,06 % pada tahun 2012 menjadi 31,21 % pada tahun 2015, angkatan kerja dengan pendidikan SD dan SMP masih mendominasi di Provinsi Kalimantan Barat.

Program CSR di bidang pendidikan memberikan nilai tambah dan berupaya memenuhi harapan masyarakat Kalimantan Barat. Upaya demikian dapat meningkatkan *legitimacy* Bank KALBAR di mata masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya institusi Bank KALBAR. Hal ini sesuai dengan unsur yang disampaikan dalam *legitimacy theory*. Selain itu, penambahan Kantor Cabang Bank KALBAR dalam rangka meningkatkan pelayanan juga menunjukkan eksistensi Bank KALBAR di kalangan masyarakat.

Dengan *legitimacy theory* dalam CSR Bank KALBAR, mendukung urgensi penerapan CSR dari *voluntary* ke *mandatory* agar terjalinnnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Regulasi yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan standar minimum yang harus dipenuhi Bank KALBAR dalam kepatuhannya sebagai perseroan terhadap Pemerintah Indonesia.

## KESIMPULAN

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud komunikasi dan akuntabilitas Bank KALBAR kepada *stakeholders*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implikasi *legitimacy theory* dalam program CSR Bank KALBAR, khususnya di bidang pendidikan.

Secara umum, pengungkapan CSR Bank KALBAR sesuai *legitimacy theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR diterapkan sebelum adanya *mandatory* UU. No 40 tahun 2007 yang mewajibkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun pengungkapan CSR masih bersifat *voluntary*, Bank KALBAR telah mengungkapkan CSR pada laporan tahunan 2006. Pelaksanaan CSR Bank KALBAR s/d tahun 2016 diwujudkan dalam 6 bidang, salah satunya dengan pendidikan sebagai prioritas pertama. Dalam satu

dasawarsa terakhir, sebagai wujud peran nyata Bank KALBAR, CSR di bidang pendidikan memberikan nilai tambah dan berupaya memenuhi harapan masyarakat. Dengan menerapkan program CSR di bidang pendidikan, kepedulian utama Bank KALBAR adalah meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai *legitimacy theory*, suatu perseroan harus bisa menunjukkan keberadaan institusi tersebut di mata masyarakat dengan peran nyata perseroan dalam memenuhi harapan masyarakat yang implisit dan eksplisit, hasil kontrak sosial. Peran nyata perseroan dengan penerapan CSR, pelaporannya dengan mengungkapkan aktivitas CSR dalam laporan tahunan perseroan.

Program CSR Bank Kalbar telah memenuhi unsur-unsur dari *legitimacy theory*. Kontrak sosial antara perseroan dan masyarakat, keberadaan institusi di mata masyarakat, dan peran nyata perseroan dalam memenuhi harapan masyarakat merupakan unsur-unsur dari *legitimacy theory*. Pengungkapan CSR Bank KALBAR sesuai *legitimacy theory*.

Penelitian ini berkontribusi dalam menentukan unsur-unsur *legitimacy theory* yang lebih kontekstual pada penerapan CSR.

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan Bank KALBAR dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia yang berminat melaksanakan CSR agar penerapan CSR dalam perseroan tersebut menjadi lebih *legitimate*.

Penelitian ini belum memberikan bukti secara empiris akan kodifikasi yang digunakan. Dengan demikian, penelitian yang akan datang diharapkan untuk menguji kodifikasi penelitian dengan menggunakan data-data kuantitatif, sehingga hasilnya dapat dibuktikan dan menjadi hipotesis penelitian.

## REFERENSI

Association of Chartered Certified Accountants. (2002). *Corporate Social Responsibility: Is There A Business Case*.

Diunduh tanggal 1 Mei 2017,

<http://accaglobal.com/sustainability>

Adams C A. (2004). The ethical, social and environmental reporting- performance portrayal gap. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(5), 731-757.

Agusti R R & Rahman A F. (2011). Relevansi Informasi Akuntansi : Peran Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Dewan Komisaris Independen. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 15(2), 121-129.

Ambadar J. (2008). *CSR dalam Praktik di Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Archel P, Husillos J, Larrinaga C & Spence C. (2009). Social disclosure, legitimacy theory and the role of the state. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 22(8), 1284 -1307.

Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2015*. Pontianak : Badan Pusat Statistik.

Diunduh tanggal 1 April 2017, <http://www.bps.go.id>

Bank KALBAR. (2017). *Laporan Tahunan Bank KALBAR*. Pontianak: Bank KALBAR.

Diunduh tanggal 1 Maret 2017, <http://www.bankkalbar.co.id>

Bebbington J, González C L & Abadía J M M. (2008), Legitimizing reputation/the reputation of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(3), 371 - 374.

Belkaoui A R. (2004). *Accounting Theory*. Cengage Learning Asia Pte Ltd. Singapore.

Branco M C & Rodrigues L L. (2006). Communication of corporate social responsibility by Portuguese banks: A legitimacy theory perspective. *Corporate Communications: An International Journal*, 11(3), 232 – 248.

- Branco M C & Rodrigues L L. (2009). Exploring the importance of social responsibility disclosure for human resources. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 13(3), 186 – 205.
- Brennan N M & Solomon J. (2008). Corporate governance, accountability and mechanisms of accountability: an overview. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(7), 885– 906.
- Burritt R L. (2012). Environmental performance accountability : planet, people, profits. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 25(2), 370– 405.
- Chariri A & Nugroho F A. (2009). Retorika dalam Pelaporan Corporate Social Responsibility : Analisis Semiotik atas Sustainability Reporting PT Aneka Tambang Tbk. *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang, 4-6 November.
- Chariri A. (2010). Rhetorics in Financial Reporting: An Interpretive Case Study. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 53-70.
- Conway S E, O'Keefe P A & Hrasky S L. (2015). Legitimacy, accountability and impression management in NGOs : the Indian Ocean tsunami. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(7), 1075–1098.
- Deegan C. (2002). Introduction The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282 – 311.
- Deegan C. (2007). *Financial Accounting Theory*. Mc Graw Hill. Singapore.
- Deegan C & Rankin M. (1996). Do Australian companies report environmental news objectively? An analysis of environmental disclosures by firms prosecuted successfully by the Environmental Protection Authority. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(2), 50-67.
- Deegan C, Rankin M, & Tobin J. (2002). An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983 - 1997 A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 312-343.
- Gray R, Owen D & Maunders K. (1988). Corporate Social Reporting: Emerging Trends in Accountability and the Social Contract. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 1(1), 6– 20.
- Guthrie J & Abeysekera I. (2006). Content analysis of social, environmental reporting: what is new? *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 10(2), 114 – 126.
- Guthrie J & Cuganesan S. (2006). Legitimacy Theory : A Story of Reporting Social and Environmental Matters within the Australian Food and Beverage Industry. Available at SSRN : <http://ssrn.com/abstract=1360518>.
- Godfrey J, Hodgson A, Tarca A, Hamilton & Holmes S. 2010. *Accounting Theory*. John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Harahap S S. (2007). *Teori Akuntansi*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Hendriksen S E & Van Breda M F. (2001). *Accounting Theory*. Mc Graw Hill. Singapore.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per Efektif 1 Januari 2015*. Divisi Penerbitan IAI. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)*. Divisi Penerbitan IAI. Jakarta.
- Isgiyarta J. (2009). *Teori Akuntansi dan Laporan Keuangan Islami*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Kotler P & Lee N. (2005). *Corporate Social Responsibility Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey.
- Krippendorff K. (2004). *Content analysis : An introduction to its methodology*. Sage Publications. Thousand Oaks, California.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2015). *Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015*. Pontianak : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Diunduh tanggal 1 April 2017, <http://kalbarprov.go.id>
- Lindawati A S L & Puspita M E. (2015). Corporate Social Responsibility : Implikasi Stakeholder Dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Mutiparadigma*, 6(1), 157-174.
- Milne M J & Patten D M. (2002). Securing organizational legitimacy An experimental decision case examining the impact of environmental disclosures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 372 – 40.
- Mobus J L. (2005). Mandatory environmental disclosures in a legitimacy theory context. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 18(4), 492– 517.
- Naraduhita D C & Sawarjuwono T. (2012). *Corporate Social Responsibility : Upaya Memahami Alasan Dibalik Pengungkapan CSR Bidang Pendidikan*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 95-189.
- Ngadri. (2017). *Gubernur Resmikan Bank Kalbar*. Dinduh tanggal 14 Mei 2017. <https://kalbar.deliknews.com/2017/04/04/gubernu-r-resmikan-bank-kalbar/>
- O'Donovan G. (1999). Managing legitimacy through increased corporate environmental reporting: an exploratory study. *Indisciplinary Environmental Review*, 1(1), 63-99.
- O'Donovan G. (2002). Environmental disclosures in the annual report Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 344– 371.
- Rankin M, Stanton P, McGowan S, Ferlauto K & Tilling M. (2012). *Contemporary Issues in Accounting*. John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Scott W R. (2003). *Financial Accounting Theory*. Prentice Hall. Toronto.
- Sekaran, U & Bougie R. (2009). *Research Method For Business A Skill-Building Approach*. John-Wiley & Sons, Inc. United States of America.
- Sheehan M, Garavan T N & Carbery R. (2014). Sustainability, corporate social responsibility and HRD. *European Journal of Training and Development*, 38(5) 370 – 386.
- Shen J & Zhu C J. (2011). Effects of socially responsible human resource management on employee organisational commitment. *The International Journal of Human Resource Management*, 22(15), 3020-3035.
- Smith M. (2015). *Research Methods in Accounting*. Third Edition. London. Sage Publications Ltd.
- Somantri G R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57-65.
- Swardjono. (2010). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Tilling M V & Tilt C A. (2010). The edge of legitimacy Voluntary social and environmental reporting in Rothmans' 1956-1999 annual reports. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 23(1), 55- 81.

Tschopp D & Huefner R J. (2012). Comparing the Evolution of CSR Reporting to that of Financial Reporting. *Journal of Academic and Business of Ethics*, 565-577.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Unerman J. (2000). Methodological issues : Reflections on quantification in corporate social reporting content analysis. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 13(5), 667–680.

Universitas Muhammadiyah Pontianak. (2016). *Beasiswa UM Pontianak*. Pontianak: UM Pontianak. Diunduh tanggal 12 Mei 2017 <http://unmuhpnk.ac.id/ump-32-daftar-beasiswa>

Vourvachis P & Woodward T. (2015). Content analysis in social and environmental reporting research: trends and challenges. *Journal of Applied Accounting Research*, 16(2), 166 – 195.

Weber R P. (1990). *Basic content analysis* (2nd ed). Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences. Series No.49. CA: Sage. Newbury Park.

Yuliana R, Purnomosidhi B & Sukoharsono E G. (2008). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dan Dampaknya Terhadap Reaksi Investor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(2) 245-276.